



Reformasi Kelembagaan dan Penerapan *Governance* Kantor Menteri Negara BUMN

*Mas Achmad Daniri
&
A.Prasetyantoko*



Governance

- Rambu: Struktur, Sistem, Peraturan, Prosedur, dan Prinsip,
- Mengarahkan & mengendalikan organ (perusahaan/lembaga),
- Meningkatkan nilai tambah dengan juga memperhatikan stakeholder,
- Sesuai peraturan perundangan dan norma yang berlaku.





Masalah BUMN

- Kinerja BUMN belum optimal;
- Terlalu besar intervensi pihak ketiga;
- Meski berbadan hukum PT, tidak selincah PT swasta;
- Pelaksanaan PSO belum sesuai dengan prinsip Good Governance;
- Penerapan Good Governance belum efektif.

Dimensi Strategis

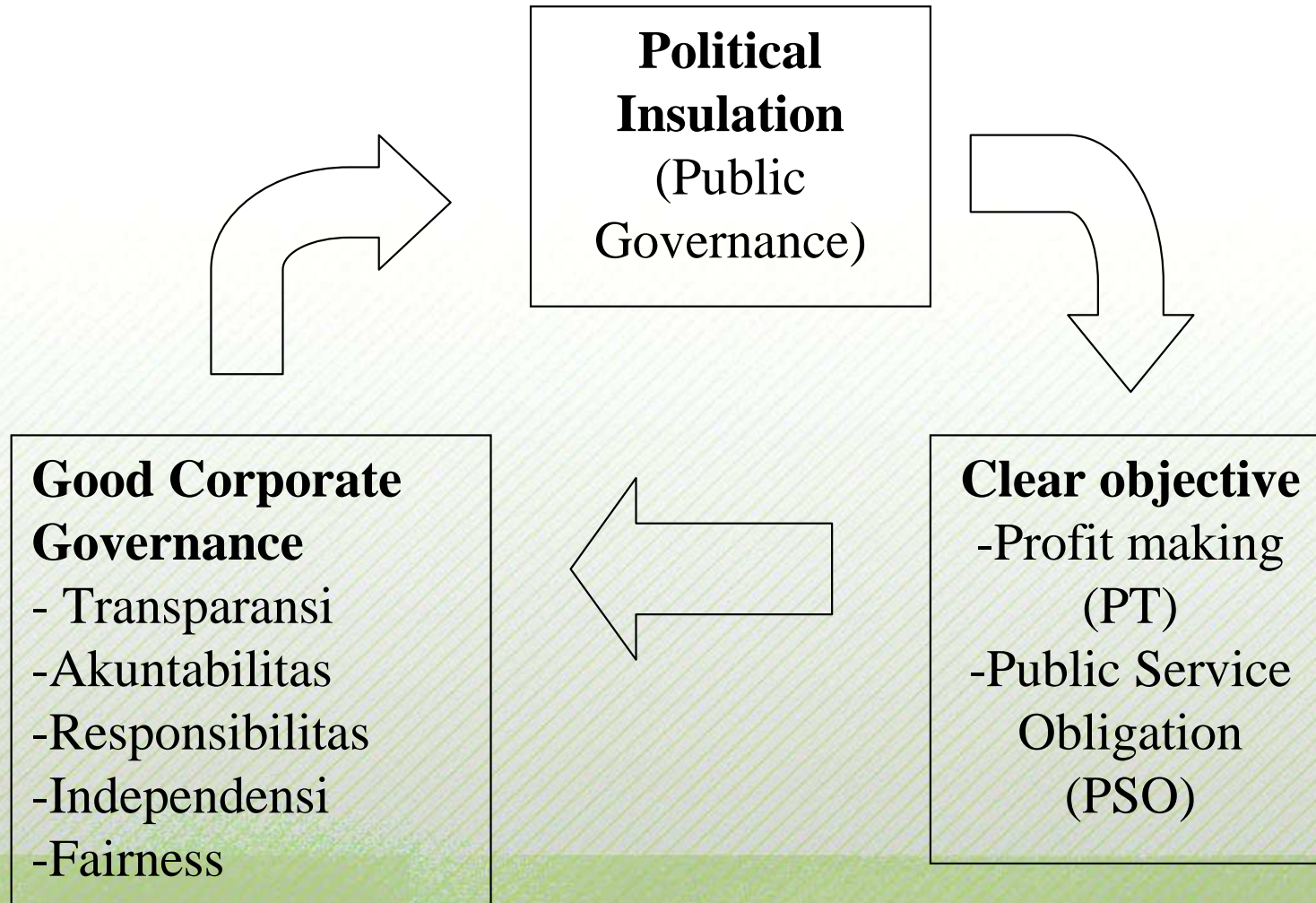
- BUMN memiliki stakeholder yang lebih kompleks
 - Kekuatan politik (parpol)
 - Parlemen
 - Birokrasi – pemerintah
- Penerapan Good Governance
 - Mencakup dimensi teknis (BUMN sebagai korporasi) → GCG
 - Dimensi strategis (BUMN sebagai bagian dari entitas politis) → GPG



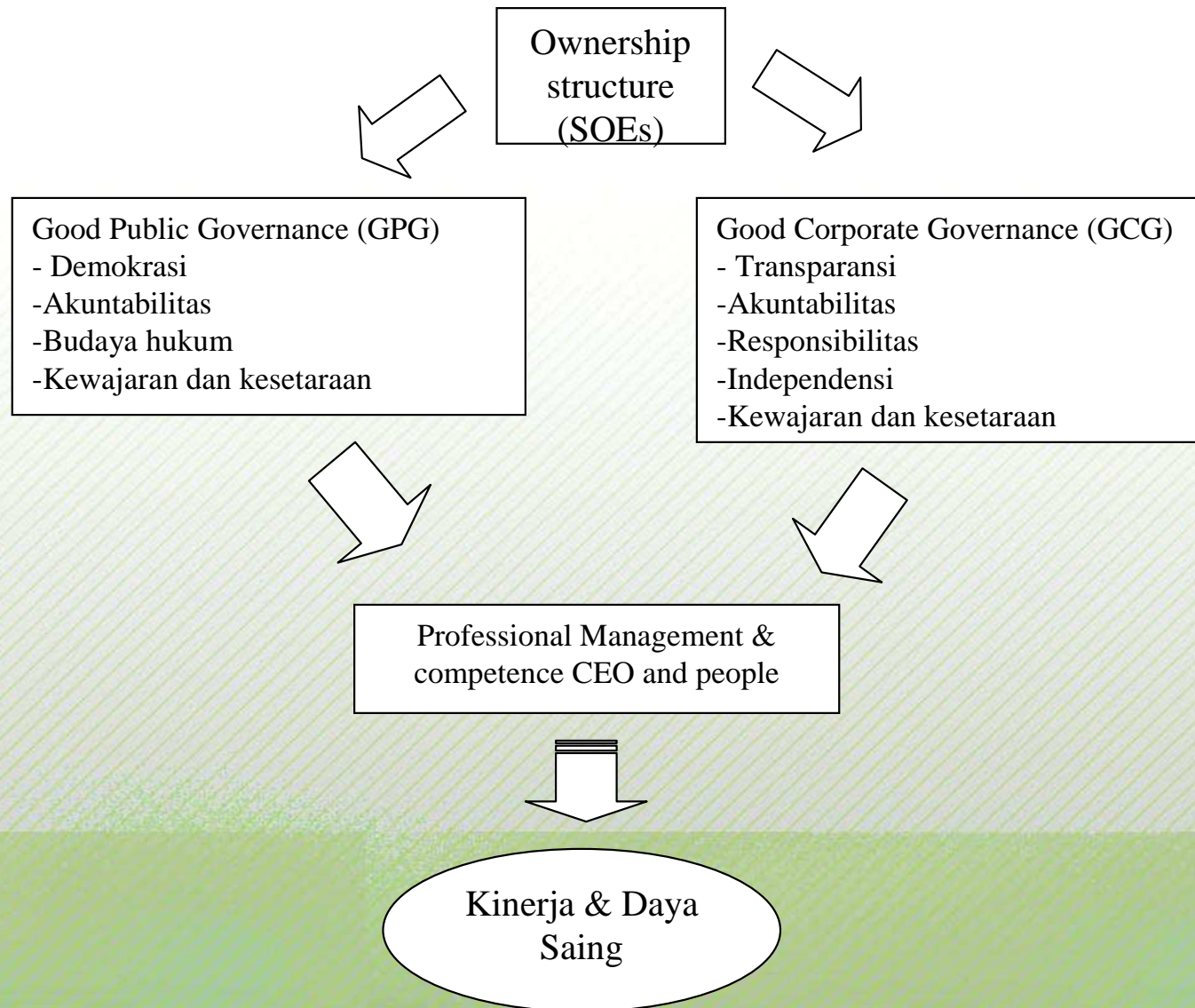
Dimensi Strategis (konstitusional & politis)

- BUMN berperan sentral dalam perekonomian → amanat UUD 1945 Pasal 33.
- Keberadaan BUMN menyangkut hajat hidup orang banyak → mengemban "misi sosial".
 - Menimbulkan moral hazard → memobilisasi BUMN demi kepentingan kelompok tertentu
 - BUMN tidak bisa bekerja secara optimal & profesional.
- Kurang komitmen:
 - Perubahan Ditjen → Meneg → Ditjen → Meneg BUMN
 - Pergantian Meneg BUMN (selama 10 th → 6 Meneg BUMN).
- Tugas utama Meneg BUMN
 - Restrukturisasi
 - Profitisasi
 - Privatisasi
- Prasyaratnya → debirokratisasi dan depolitisasi

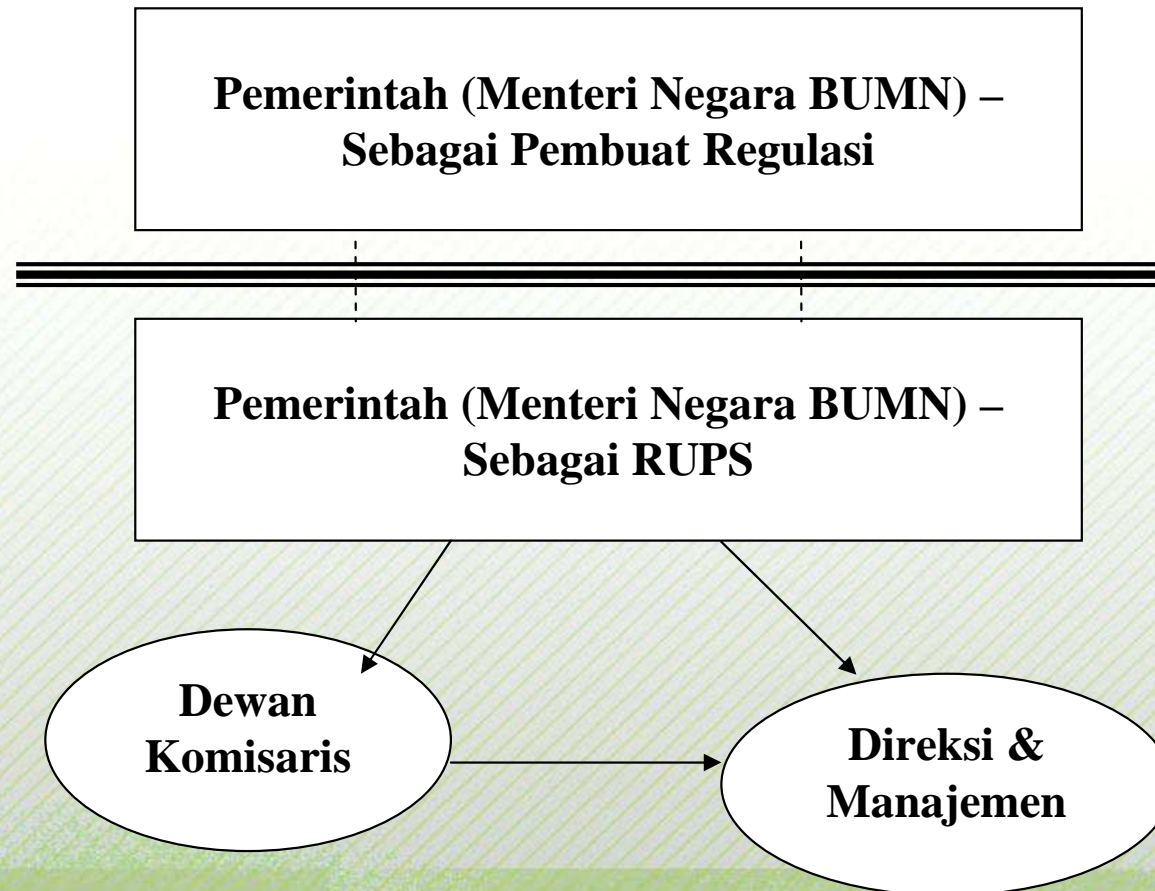
Tiga Proses: Political Insulation, Clear Objective & GCG



Orientasi pada Kinerja & Daya Saing

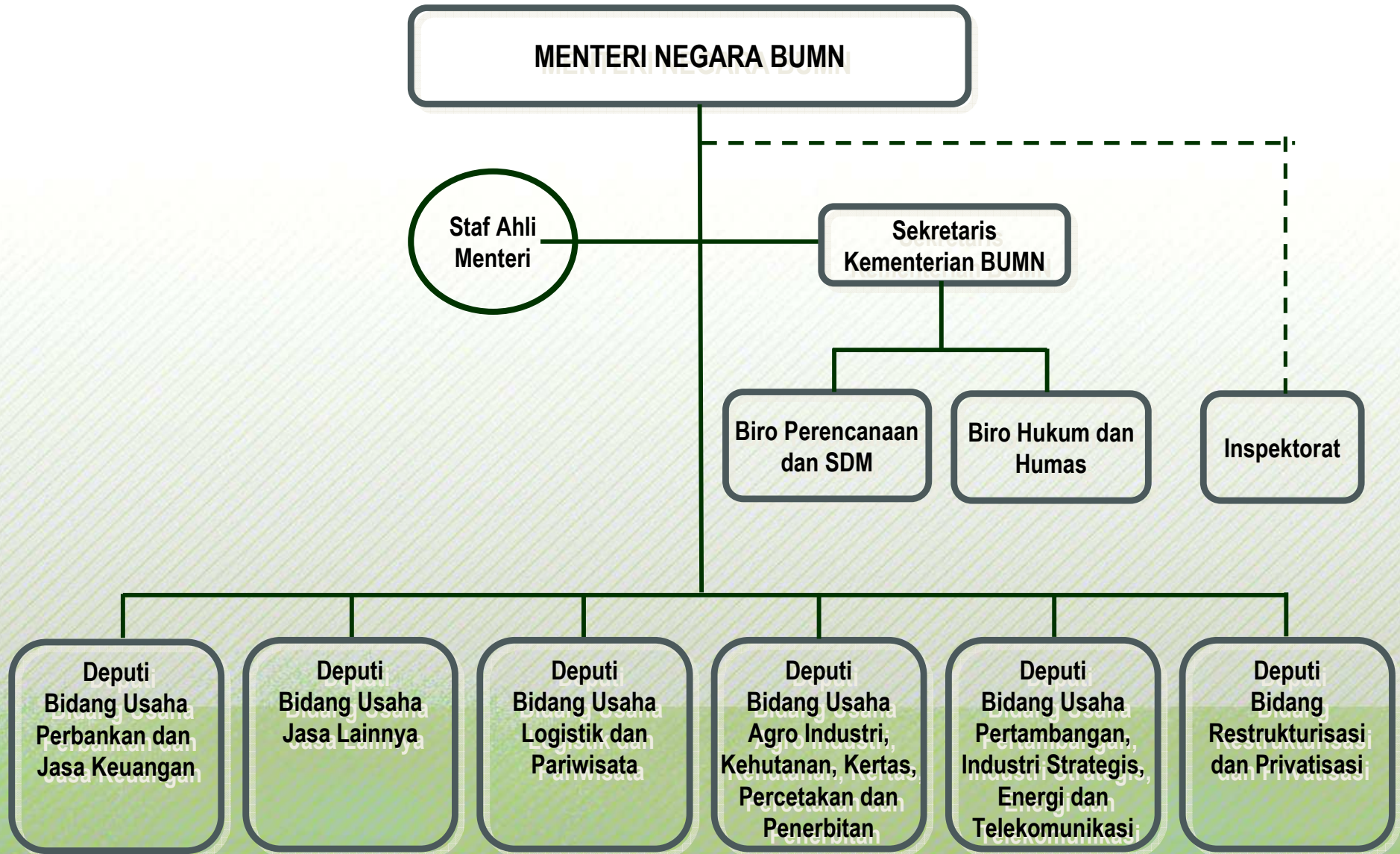


SISTEM GOVERNANCE BUMN

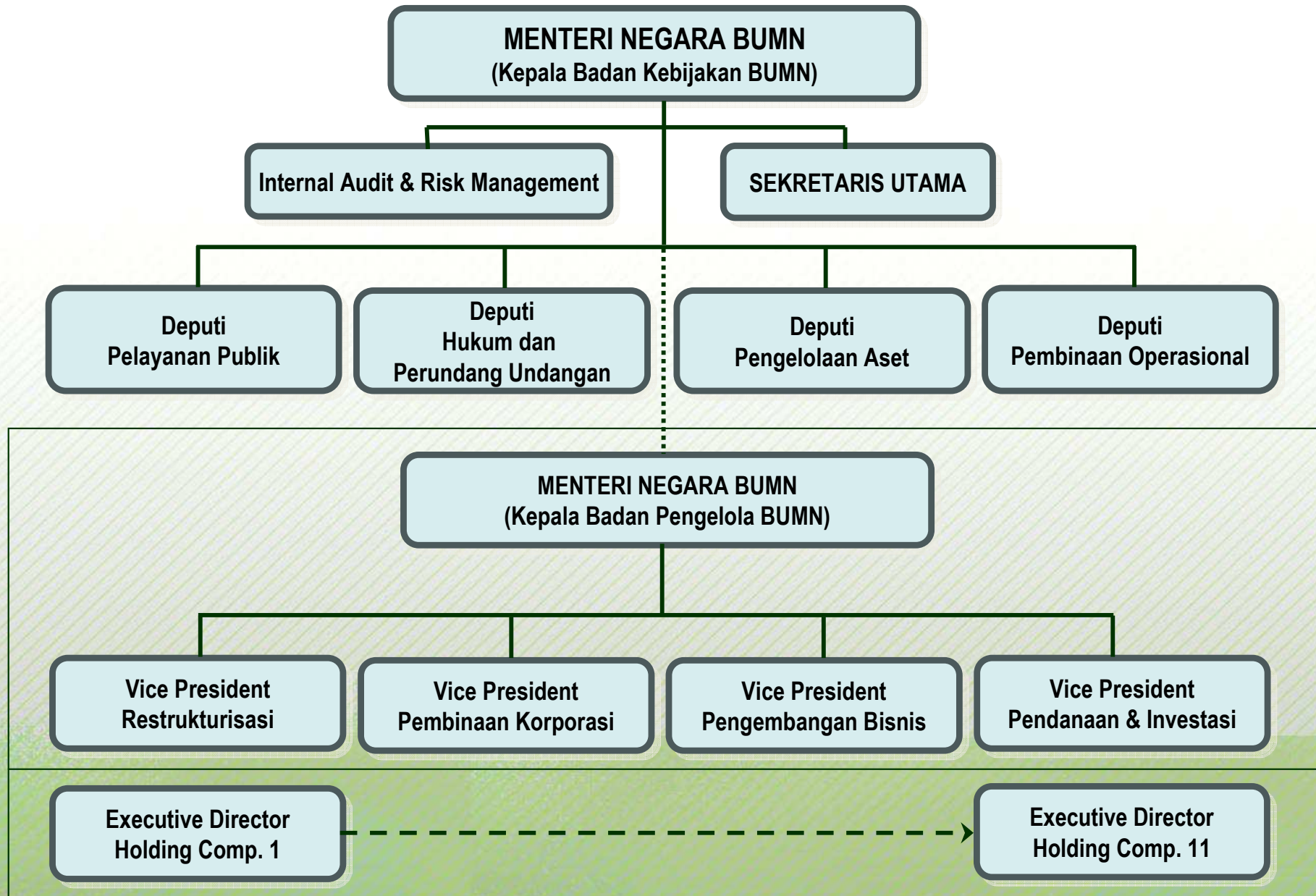


Sumber : Penulis

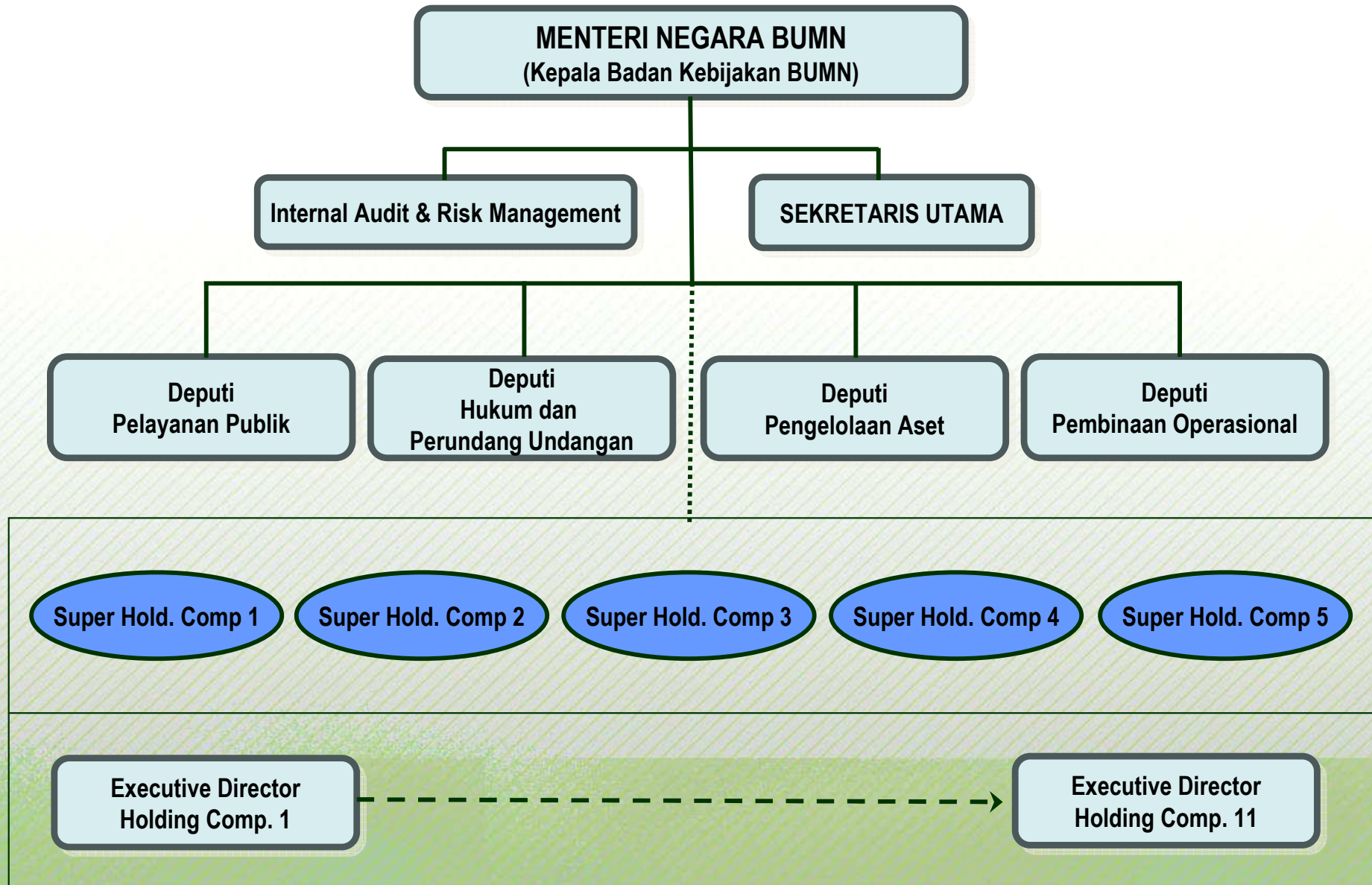
Struktur Saat Ini



Struktur Transisi



Struktur Ideal



Langkah Kedepan

- Menegaskan Konsensus Nasional → menyamakan persepsi.
- Menyepakati *platform* perubahan
 - membangun komitmen
 - menyiapkan rambu-rambu
- Melaksanakan secara konsisten dan terukur





THANK YOU

